



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Lemahlembur Lirisul Arahul Krahulandul

**#bangga
melayani
bangsa**

TAMAN AIR MANCUR SRI BADUGA

2024

CASCADING KINERJA

**SEKRETARIAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
2024**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur dipanjatkan ke Hadapan Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta dapat menyusun Cascading Tahun 2024, sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yg bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Instruksi Presiden No 7 Tahun 1999 Tentang LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) serta Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Secara Substanstif Cascading Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 merupakan Sarana Perjanjian Kinerja (PK) dalam rangka mengimplementasikan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang menginformasikan tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan visi, misi, tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, *Clean Government* dan *Good Governance*.

Akhir kata Cascading ini diharapkan akan mampu menggambarkan pelaksanaan kegiatan guna mengantisipasi dan menjawab tantangan Dinamika Pembangunan ekonomi Berbasis Kerakyatan dimasa mendatang serta mampu memenuhi kebutuhan perkembangan IPTEK dan Isu Global yang menjadi komitmen pembangunan nasional.

Purwakarta, Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

NORMAN NUGRAHA
NIP. 19831117 200604 1 009

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar isi	ii
Daftar Gambar/Tabel	

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	
1.2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	
1.3. Dasar Hukum Penyusunan Cascading Kinerja	
1.4. Sistematika Penulisan	

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis	
2.2. Visi dan Misi	
2.3. Tujuan, Sasaran dan Indikator sasaran	
2.4. Strategi dan Kebijakan Umum	
2.5. Pohon Kinerja	

BAB III PENJENJANGAN KINERJA

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dibangun dan dikembangkan dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban program instansi pemerintah.

Akuntabilitas yang merupakan kata kunci dapat diartikan sebagai perwujudan dari kewajiban seseorang atau instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban dan berupa laporan akuntabilitas yang disusun secara periodik.

Dalam rangka menilai perkembangan implementasi SAKIP serta pemberian saran perbaikan, Kementerian PAN dan RB melakukan evaluasi setiap tahunnya berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah kepada seluruh instansi pemerintah.

Dalam pelaksanaan evaluasi SAKIP, setiap instansi pemerintah wajib mengkomunikasikan perkembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimulai dari data perangkat daerah, tingkat pengukuran data, sampai kelengkapan dokumen, kelengkapan isi dokumen dan keselarasan antar dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan hasil evaluasi dan rekomendasi Tim KemenpanRB, salah satu yang menjadi indikator implementasi akuntabilitas kinerja yaitu terdapat dokumen pohon kinerja dan cascading yang telah disusun baik dilevel Pemda maupun level perangkat daerah belum begitu tepat dalam mengurai jalur kinerja yang logis dalam pencapaian outcome.

Untuk menyusun pohon kinerja yang tepat membutuhkan SDM yang mampu menterjemahkan dan menjabarkan jalur kinerja logis dan terukur dalam pencapaian outcome berdasarkan Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama, dan Rencana Kinerja Tahunan. Dengan adanya pohon kinerja yang tepat akan menjadi dasar dalam penjenjangan (cascading) kinerja instansi pemerintah sehingga target peningkatan nilai capaian SAKIP dapat terealisasi dan yang lebih utama anggaran dan program kegiatan dalam pencapaian visi misi kabupaten menjadi lebih tepat sasaran dan lebih terarah sehingga penyelenggaraan administrasi pemerintahan dapat berjalan dengan pasti, berbagai bentuk penyimpangan dapat dihindari dan pada gilirannya kualitas pelayanan kepada publik akan menjadi lebih baik.

1.2. STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

Struktur Organisasi dan Tata Kerja dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, Bupati Purwakarta sebagai Kepala Daerah perlu dibantu oleh perangkat daerah dalam melaksanakan seluruh urusan pemerintahan yang menjadi wewenang pemerintah daerah.

Struktur organisasi pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 232 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta, dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan Sekretariat Daerah sebagai Tipe A, menyelenggarakan pendukung urusan pemerintahan unsur sekretariat daerah.

Susunan organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta pada Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah terdiri atas :

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas :

1. Bagian Pemerintahan, dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 2. Bagian Hukum, dan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat, dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan, terdiri atas:
1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 2. Bagian Administrasi Pembangunan, dan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Umum, terdiri atas:
1. Bagian Organisasi, dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 2. Bagian Umum, dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 4. Bagian Perencanaan dan Keuangan, terdiri atas :
 - a) Subbagian Keuangan; dan
 - b) Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Jabatan Fungsional.

1.3. DASAR HUKUM PENYUSUNAN CASCADING KINERJA

Dasar hukum dalam penulisan dokumen *Cascading Kinerja* ini adalah

1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil.
5. Per Pres. Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Kementerian PAN & RB.

6. PermenpanRB Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Sistem Manajemen Kerja Pegawai Negeri Sipil.
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan penyusunan *Cascading* Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2024 adalah :

1. Dokumen *Cascading* Kinerja Pejabat Eselon II, Eselon III dan Pejabat Fungsional di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2024.
2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Perekonomian yang tercantum di dalam RPJMD serta RENSTRA Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024.

Adapun Sistematika Penulisan Laporan *Cascading* Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2024 terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja
- 1.3. Dasar Hukum Penyusunan *Cascading* Kinerja
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- 2.1. Rencana Strategis
- 2.2. Visi dan Misi
- 2.3. Tujuan, Sasaran dan Indikator sasaran
- 2.4. Strategi dan Kebijakan Umum
- 2.5. Pohon Kinerja

BAB III PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN DAN POHON KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan Pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial untuk jangka waktu tertentu.

Dalam mekanisme pemerintahan, perencanaan pembangunan tersebut dijalankan melalui suatu sistem perencanaan pembangunan yang terkoordinasi dan terintegrasi, untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka Panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintah dan masyarakat. Sistem perencanaan pembangunan itu sendiri dimaksudkan untuk memberikan perencanaan, dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah yang berkelanjutan dan membentuk suatu siklus perencanaan yang utuh.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan Langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis local, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Purwakarta. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Sebagai kerangka perencanaan jangka Panjang yang dijabarkan dengan perencanaan jangka menengah melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) secara sistematis mengedepankan isu-isu local, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan yang merupakan penjabaran visi dan misi untuk mencapai tujuan dan sasaran, sehingga dapat diimplementasikan secara

bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

2.2. VISI DAN MISI

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut ke mana instansi Pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah.

Berdasarkan kondisi Kabupaten Purwakarta pada saat ini, tantangan dan isu strategis yang akan dihadapi dalam 5 tahun mendatang dengan mempertimbangkan modal dasar yang memiliki serta berpedoman pada visi pembangunan Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 yaitu :

Visi Kabupaten Purwakarta

“ Purwakarta Cerdas, Sehat dan Berakhlakul Karimah”

Misi Kabupaten Purwakarta

1. Meningkatkan Kualitas SDM yang Berpendidikan dan Berakhlakul Kharimah
2. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Lingkungan Hidup
3. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat yang Berdaya Saing dan Berbasis Potensi Lokal
4. Meningkatkan Ketersediaan Insfrastruktur dan Penataan Wilayah
5. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efesien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat.

2.3. TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) samapai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasrkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, tetapi harus dapat menunjukan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten

Purwakarta, yang ditempuh melalui penetapan beberapa sasaran yang satu dengan lainnya saling terkait, tujuan yang ditetapkan adalah **Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik dan efektif.**

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan adalah **Meningkatnya penerapan reformasi birokrasi dan penyelenggaraan pemerintah umum yang baik dan efektif.**

Selanjutnya ditetapkan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) sebagai IKU (Indikator Kinerja Utama) untuk mengukur apakah Sasaran Strategis (ss) dapat mengkonfirmasi Tujuan Strategis (TS) yang akan dicapai.

Sebagai visi dan misi yang telah ditetapkan untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta, yang ditempuh melalui penetapan beberapa sasaran yang satu dengan lainnya saling berkaitan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan IKU
Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta

Visi : Purwakarta Cerdas, Sehat dan Berakhlakul Karimah		
Misi ke- Lima : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat		
Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel.	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP Kabupaten.

	melaui Penerapan SPBE	
	Meningkatnya Maturitas Penyelemnggaraan Pemerintahan Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi
		Nilai LPPD kabupaten
		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
		Capaian SAKIP Perangkat Daerah
		Indeks Kepuasan Masyarakat
		Nilai LPPD Kabupaten
		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

2.4. STRATEGI DAN KEBIJAKAN UMUM

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana Tujuan dan Sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian Kebijakan. Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan Tindakan untuk melaksanakan Strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran. Berikut Strategi dan Kebijakan yang dirumuskan Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta, yaitu:

a. Strategi

Meningkatkan Sistem Manajemen Urusan Pemerintahan

b. Kebijakan

Kebijakan merupakan arah Tindakan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program/kegiatan guna kelancaran dan keterpaduan dalam

mencapai sasaran, tujuan, serta visi dan misi Pemerintahan Daerah. Sekretariat Daerah selaras dengan kebijakan Pemerintahan Kabupaten Purwakarta bhaian dengan kebijakan Pemerintahan Pusat. Kebijakan Umum Sekretariat Daerah yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta

Visi :Purwakarta Cerdas, Sehat dan Berakhlakul Karimah			
Misi ke- Lima : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 7	Sasaran 7 .14	Strategi 7.14.1	
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel.	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui Penerapan SPBE	Meningkatnya Sistem Manajemen Urusan Pemerintahan	Pengintensifan Pengawasan dan Pembinaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
	Meningkatnya Maturitas Penyelemnggaraan Pemerintahan Daerah		Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien
			Penataan Sistem Regulasi Perundang-undangan Secara Tertib dan Efektif
			Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan
			Penguatan Kebijakan dan

			Implementasi Manajemen Kinerja Aparatur Sipil Negara
			Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Daerah

2.5. POHON KINERJA

Pohon Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target yang ingin dicapai dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Perjanjian Kinerja yang akan dicapai menggambarkan Perjanjian Kinerja Utama (IKU) untuk Pejabat Eselon II, Sasaran Program (Outcome) untuk Pejabat Eselon III serta Output sebagai Indikator Kinerja untuk Eselon IV. Adapun Rincian Perjanjian Kinerja atau Pohon Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2024 dapat dilihat pada Lampiran.

POHON KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA 2024

SEKRETARIS DAERAH					
Tujuan : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien					
Indikator Kinerja Utama (IKU)		1. Indeks Reformasi Birokrasi			
		2. Persentase Produk Hukum Daerah yang Ditetapkan			
		3. Persentase fasilitas Bantuan Hukum			
		4. Persentase Sosialisasi Produk Hukum			
		5. Capaian Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)			
		6. Persentase Kerjasama Daerah yang Sesuai dengan Kebutuhan			
		7. Persentase Fasilitasi Naskah Kerjasama Daerah			
		8. Persentase Identifikasi dan Inventarisasi Wilayah Perbatasan dan Rupa Bumi buatan dan Alam yang Terdokumentasi			
Asisten Sekretaris Daerah Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat					
Indikator		1. Capaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah			
		2. Persentase Produk Hukum yang Berkeadilan, Efektif dan Tepat Sasaran			
		3. Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik			
Kepala Bagian Pemerintahan		Kepala Bagian Hukum		Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	
Indikator Utama	Capaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Indikator Utama	Persentase Produk Hukum yang Berkeadilan, Efektif dan Tepat Sasaran	Indikator Utama	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik
Indikator Program	1. Tersusunnya Dokumen LPPD dan ILPPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024	Indikator Program	1. Terpenuhinya Kajian terhadap Naskah Akademis yang Dibuat	Indikator Program	1. Terfasilitasinya Kegiatan Keagamaan dengan Baik
	2. Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kinerja Penyusunan LPPD dan RLPPD		2. Terlaksananya Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah Tahun 2024		2. Meningkatnya Kualitas Kegiatan Festival Ramadhan Tk. Kabupaten Purwakarta
	3. Tersedianya Operasional Kegiatan Peningkatan Kinerja pada Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah		3. Terlaksananya Penyelenggaraan Bimtek Aparatur Pemerintah Daerah dalam Menyusun		3. Meningkatnya Kualitas SDM dan Kinerja Pemuka Agama di Kabupaten Purwakarta

		Rancangan Produk Hukum Daerah	
	4. Tersedianya Penunjang Kerjasama Daerah	4. Terlaksananya Fasilitas dan Evaluasi Produk Hukum daerah Raperda dan Raperbup Tahun 2024	4. Meningkatnya Pemahaman tentang Bahaya Narkoba di Lingkungan Purwakarta
	5. Terselenggaranya Kegiatan Penyusunan SPM 6 Urusan Pemerintahan	5. Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	5. Meningkatnya Kinerja Komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Purwakarta
	6. Terlaksananya Kegiatan Penegasan Batas Daerah di Wilayah Kabupaten Purwakarta	6. Terlaksananya Penyelesaian Hukum dan Gugatan Hukum Non Legasi di Pemerintahan Kabupaten Purwakarta	6. Meningkatnya Kinerja TP UKS Kabupaten dan Kecamatan
	7. Terlaksananya Kegiatan Verifikasi Nama Rupa Bum,l unsur Buatan	7. Terlaksananya Kerja Sama Penanganan Perkara Hukum dengan Kantor Hukum Profesional	7. Meningkatnya Kinerja Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Purwakarta
	8. Terlaksananya Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan Se-Kabupaten Purwakarta	8. Terlaksananya Penanganan Institusi RANHAM di Kabupaten Purwakarta	8. Persenatase MeningkatnyaKonsolidasi Linatas Sekltor Kebencanaan di Kabupaten Purwakarta
	9. Terlaksananya Penilaian Sinergitas Kinerja Kelurahan Se-Kabupaten Purwakarta	9. Terlaksananya Penyelenggaraan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan di Kecamatan dan Desa/Kelurahan	9. Terfasilitasinya Kegiatan Kemasyarakatan dengan Baik
	10. Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Aparatur Kecamatan dan Kelurahan Se-Kabupaten Purwakarta	10. Terlaksananya Penyelenggaraan Bimtek Aparatur Pemerintaha Desa dalam Menyusun	10. Terpenuhinya Monev Program pada Kegiatan Kesra dan Kemasyarakatan

		Rancangan Produk Hukum Desa	
		11. Terlaksannya Penataan Dokumentasi Hukum dengan Pemanfaatan dan Pengembangan Teknologi Dokumentasi Hukum	11. Persentase Meningkatnya Kemampuan dan Pemahaman tentang Berorganisasi yang Baik bagi Organisasi Kepemimpinan dan Olah Raga di Kabupaten Purwakarta
		12. Terlaksananya Penyelenggaraan Sosialisasi dan Konsultasi Hukum di Desa/Kelurahan	
		13. Terlaksananya Penyelenggaraan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Kabupaten Purwakarta	

Asisten Sekretaris Daerah Bagian Perekonomian dan Pembangunan					
Indikator		1. Persentase Penyusunan Anggaran yang Tepat waktu dan Sesuai Peraturan Perundang-undangan			
		2. Persentase Peningkatan Capaian Kinerja Pembangunan			
		3. Optimalisasi Pengelolaan Sistem Pengadaan Barang/Jasa			
Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam		Kepala Bagian Administrasi Pembangunan		Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	
Indikator Utama	Persentase Peningkatan Capaian Kinerja Pembangunan	Indikator Utama	Persentase Peningkatan Capaian Kinerja Pembangunan	Indikator Utama	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik
Indikator Program	1. Jumlah Wilayah Perusahaan Daerah, Lembaga Keuangan Perbankan dan Non Perbankan yang dimonitor dan Evaluasi di Kabupaten Purwakarta	Indikator Program	1. Terlaksananya Bimtek Penatausahaan Keuangan OPD Setda	Indikator Program	1. Terlaksananya Peningkatan Kinerja Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa
	2. Jumlah Wilayah Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Produksi Pertanian, Peternakan dan Perikanan di Kabupaten Purwakarta		2. Terlaksananya Pengadaan Sarana Administrasi Keuangan dan Pelayanan Keuangan SETDA		2. Terlaksananya Peningkatan Kinerja Admin Rencana Umum Pengadaan
	3. Jumlah Wilayah dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Purwakarta yang dipantau dan Dievaluasi		3. Terlaksananya Penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD		3. Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Bantuan Hukum Pengadaan Barang/Jasa
	4. Jumlah Buku Laporan Pelaksanaan tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah		4. Terlaksananya penyusunan LAKIP SETDA Tahun 2024		4. Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan Kapentensi dan Kapasitas Keahlian PPK dalam Persiapan Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa
	5. Jumlah Pasar Desa dalam Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pasar Desa		5. Tersedianya Dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2024		5. Terlaksananya Pemeliharaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) LPSE Purwakarta

	6. Jumlah Agen Gas di Wilayah Kabupaten Purwakarta yang Dimonitoring dan Evaluasi	6. Terlaksnaanya Seluruh Kegiatan Sistem Penguatan dan Pengendalian Intern Pemerintah di Kabupaten Purwakarta	6. Terlaksananya Kegiatan Langganan Sewa Bandwith LPSE Purwakarta
	7. Jumlah Wilayah Sentra Usaha Kecil Daerah yang Dipantau dan Evaluasi di Kabupaten Purwakarta	7. Jumlah Dokumen Juknis Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah	7. Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Perawatan Rutin Berkala melalui Service Level Agreement Colocation Server UKPBJ Kabupaten Purwakarta
		8. Tersedianya Dokumen Analisis Standar Belanja Daerah	8. Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana BLPBJ
		9. Terlaksananya Pelaksanaan Sistem Informasi Pembangunan	9. Terlaksananya Pemeliharaan Gedung BLPBJ Purwakarta
		10. Tersedianya Laporan Realisasi Fisik dan Anggaran Pembangunan Tahun 2024	10. Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Keahlian Pengadaan Barang/Jasa
		11. Tersedianya Data Base Bidang Lingkungan Hidup dan Perhubungan	
		12. Tersedianya Penyusunan Arsitektur dan Peta Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	
		13. Tersedianya Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Prasarana Wilayah	

		14. Tersedianya Hasil Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup dan Perhubungan		
		15. Tersedianya Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Tekno;ogi Informasi		

Asisten Sekretaris Daerah Bagian Administrasi Umum							
Indikator		1. Persentase Peningkatan Daerah yang Strukturnya sesuai dengan Fungsi Organisasi					
		2. Persenatase Dokumen Ketatalaksanaan yang disusun sesuai dengan Kebutuhan Organisasi					
		3. Persentase Peningkatan Daerah yang sudah Melaksanakan Reformasi Birokrasi					
		4. Persenatase Pegawai yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi					
		5. Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor					
		6. Persenatase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik					
Kepala Bagian Organisasi		Kepala Bagian Umum		Kepala Bagian Prokompim		Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan	
Indikator Utama	Persentase Dokumen Ketatalaksanaan yang disusun dengan Keberadaan Organisasi	Indikator Utama	Persentase Pegawai yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi	Indikator Utama	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor	Indikator Utama	Persentase Dokumen Perencanaan yang disusun Tepat Waktu
	Persentase Perangkat Daerah yang sudah Melakukan Reformasi Birokrasi		Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Darana dan Prasarana Kantor		Persentase Realisasi Belanja Daerah Terhadap Anggaran		
	Persenatse Perangkat Daerah yang Strukturnya sesuai dengan Fungsi Organisasi				Jumlah Kegiatan Evaluasi dan Monitoring Perencanaan dan Keuangan		
	Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik				Tingkat Kepatuhan Pelaporan Keuangan dan Perencanaan		
Indikator Program	1. Terjalinnya Komunikasi dan Kekeluargaan Sekretariat Daerah Seluruh Indonesia	Indikator Program	1. Tersedianya Pegawai yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi	Indikator Program	1. Meningkatnya Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH	Indikator Program	1. Tersedianya Dokumen Perencanaan SKPD

	2. Meningkatnya Penyelenggaraan Perbup Tata Naskah Dinas di Kabupaten Purwakarta		2. Tersedianya Data Kinerja OPD		2. Tersedianya Penunjang Kinerja Keprotokolan		2. Tersedianya Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan dan Keuangan
	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		3. Terlaksananya Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan yang Tepat Waktu dan Sesuai Dengan Perundang-Undangan		3. Tersedianya Sarana dan Prasarana Keprotokolan		3. Terlaksananya Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan yang Tepat Waktu dan Sesuai dengan Perundang-Undangan
	4. Meningkatnya Pelayanan Unit Penyelenggaraan Publik		4. meningkatnya Pemenuhan		4. Tersedianya Sarana dan Prasarana Alat Komunikasi Pimpinan		4. Tersedianya Laporan Realisasi Fisik dan Anggaran SKPD

BAB III

PENUTUP

Sebagai bagian penutup dari Cascading Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa Penyusunan Cascading Kinerja ini adalah untuk memberikan Gambaran Tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran visi dan misi Kabupaten Purwakarta bagi Pejabat Eselon yang ada dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta yang mengidentifikasi Tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Program dan Kebijakan yang ditetapkan.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabelitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatkannya control dari Masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Demikianlah Laporan Cascading Kinerja ini dibuat semoga bermanfaat, kritik dan saran yang disampaikan akan diterima untuk kesempurnaan dimasa mendatang.



LAMPIRAN